

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya penguatan pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menurut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah.

Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Bentuk otonomi dalam bidang pendidikan berbeda dengan otonomi bidang lainnya, otonomi dibidang pendidikan tidak terhenti pada daerah tingkat kabupaten dan kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai untuk tombak penyelenggara pendidikan. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pembangunan strategi sesuai dengan kondisi setempat, maka sekolah dapat memberdayakan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas pertama yaitu mengajar. Selain itu sekolah sebagai lembaga pendidikan di beri kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan program-program dan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat.

Sekolah juga harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan

masyarakat menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa menjadi mandiri, serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas.

Sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan dan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dapat menangkap momentum otonomi sekolah dengan melakukan reformasi diri untuk mewujudkan otonomi sekolah tersebut. Dengan sifat otonominya sekolah diharapkan bukan lagi institusi mekanik, birokrasi dan institusi yang kaku, tetapi dengan sifat otonomi tersebut, sekolah menjadi sebuah institusi yang demokratis, kreatif, dan inovatif untuk melakukan pembaharuan diri (*self reform*).

Dengan demikian otonomi sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku. (Kemendiknas, 2007: 12).

Otonomi sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum untuk penguatan kualitas pendidikan sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang berada di depan (*line staf*), yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksana kebijakan, dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut, yaitu siswa, guru dan kepala sekolah.

Keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam penguatan pendidikan karakter siswa di sekolah tentunya sudah menjadi tanggung jawab pihak sekolah hingga dapat mendorong siswa untuk membangun karakter siswa agar menjadi pribadi yang dapat dibanggakan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Menurut Sagala (dalam Hasbullah 2006:163) Mengemukakan bahwa otonomi sekolah merupakan tindakan desentralisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sampai ke tingkat sekolah (guru kelas) yang menuntut kesiapan pengelola berbagai level untuk melakukan peran sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Jadi secara konseptual otonomi sekolah adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah agar sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola secara mandiri kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku guna untuk menguatkan kualitas pendidikan, terutama dalam penguatan pendidikan karakter siswa di sekolah.

Otonomi sekolah, seluruh komponen yang terkait dengan sekolah punya kewajiban untuk saling mendukung demi optimalisasi peran sekolah dalam mendampingi anak bangsa menuju pada tingkat kedewasaan secara mental fisik dan intelektual. Guru, karyawan, orang tua siswa, alumni dan masyarakat yang peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan disebuah sekolah.

Melalui otonomi yang luas dapat menguatkan kependidikan dengan menawarkan partisipasi aktif warga sekolah dalam penguatan pendidikan karakter siswa sebagai tanggung jawab bersama di sekolah. sebagaimana diketahui bahwa

dalam penguatan pendidikan karakter siswa tak lepas dari tanggung jawab oleh seorang pimpinan serta staf lainnya. Pelaksanaan otonomi sekolah secara efektif dan efisien menuntut seorang kepala sekolah, memiliki pandangan luas tentang sekolah dan pendidikan. Kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai kepala sekolah agar dapat melaksanakan penguatan pendidikan karakter siswa dalam hal proses belajar mengajar dengan melakukan supervise kelas, membina dan memberikan saran-saran positif pada guru. Dengan demikian penguatan pendidikan karakter siswa merupakan tanggung jawab sekolah itu sendiri. Dalam melaksanakan penguatan pendidikan karakter siswa sangatlah penting untuk maju mundurnya organisasi atau lembaga. Penguatan pendidikan karakter siswa yang tepatlah yang akan menghasilkan suatu perubahan terhadap sekolah kearah yang lebih baik, tapi sebaliknya jika penguatan karakter siswa yang salah akan berdampak pada sekolah.

Penguatan pendidikan karakter siswa di sekolah merupakan hal yang sangat substansial dan harus dilakukan. Kondisi ini mengingatkan bahwa sekolah merupakan intuisi yang harus diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang memerlukan pemecahan masalah. Usaha untuk mencari solusi yang tepat atas berbagai masalah yang muncul tersebut harus melalui proses penguatan pendidikan karakter siswa yang secara baik. Dimana proses penguatan karakter siswa dapat dilakukan dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus. Hal tersebut perlu dilakukan agar melatih pribadi siswa untuk memiliki karakter yang baik didalam sekolah maupun diluar sekolah.

Dengan demikian pendidikan yang ada di sekolah dapat memberikan tuntutan kepada warga sekolah yang diberikannya oleh orang yang paling bertanggung jawab yaitu semua warga sekolah, dimana semua warga sekolah ( kepala sekolah, guru-guru) adalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap penguatan karakter siswa melalui penilaian perubahan karakter siswa di sekolah melalui peraturan yang diterapkan oleh sekolah.

Untuk itu dalam mewujudkan tujuan pendidikan karakter, sangat dibutuhkan peran guru dalam pengelolaan pendidikan karakter yang benar-benar memiliki kekuatan dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai karakter yang diharapkan, bukan sekedar konsep yang ditempelkan pada mata pelajaran tertentu untuk mendapatkan pengakuan bahwa pendidikan karakter sudah dilaksanakan, sehingga tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kepribadian peserta didik.

Berdasarkan observasi awal di SMK Negeri 2 Kota Gorontalo, penguatan pendidikan karakter siswa sudah diterapkan, selain itu ada beberapa bentuk aktivitas yang menjadi perwujudan dari penguatan pendidikan karakter yakni: pembiasaan perilaku siswa yang mengarah kepada penguatan kesadaran diri dan lingkungan (akhlak mulia) dengan wujud: tiap-tiap siswa datang kesekolah pagi hari memunguti sampah dan membuangnya ke tong sampah; melaksanakan zikir bersama setiap hari jum'at, pembiasaan tersebut sudah dilakukan sejak tahun pelajaran 2010-2011 hingga sekarang.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang Guru penjaskes yang saya wawancarai, bahwa penguatan pendidikan karakter sudah diterapkan, baik itu mengatur perilaku siswa maupun melakukan pembinaan dikelas dan pembinaan ketakwaan di mesjid serta pembinaan lainnya melalui Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR), namun hal-hal yang berhubungan dengan administrasi pembelajaran yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter siswa seperti kurikulum, sarana, cara-cara mengajar apalagi dalam hal menegakan disiplin terhadap siswa pada pagi hari sampai waktu pulang sekolah masih jadi masalah, karena kendalanya bukan hanya siswa; tetapi guru juga sendiri masih jauh dari sikap disiplin dalam melaksanakan tugasnya; mereka belum bisa memberikan keteladanan yang sungguh-sungguh. Sehingga tidak mengherankan kalau disiplin yang diharapkan belum berjalan baik, demikian pula kejujuran, sopan santun, kreatifitas dan kemandirian belum bisa diwujudkan secara maksimal di sekolah, apalagi dirumah.

Berdasarkan temuan penelitian diatas maka peneliti tertarik mengkaji dan melakukan penelitian mendalam tentang otonomi sekolah dalam penguatan pendidikan karakter siswa di SMK Negeri 2 Gorontalo.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana otonomi sekolah merencanakan program penguatan karakter siswa di SMK Negeri 2 Kota Gorontalo?

2. Bagaimana otonomi sekolah melaksanakan program penguatan karakter siswa di SMK Negeri 2 Kota Gorontalo?
3. Bagaimana otonomi sekolah mengevaluasi program penguatan karakter siswa di SMK Negeri 2 Kota Gorontalo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui otonomi sekolah merencanakan program penguatan karakter siswa di SMK Negeri 2 Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui otonomi sekolah melaksanakan program penguatan karakter siswa di SMK Negeri 2 Kota Gorontalo
3. Untuk mengetahui otonomi sekolah mengevaluasi program penguatan karakter siswa di SMK Negeri 2 Kota Gorontalo

### **D. Manfaat Penelitian.**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai informasi dan acuan bagi sekolah yang bersangkutan.

1. kepala sekolah

bagi kepala sekolah lebih meningkatkan kerja sama dengan warga sekolah sebagai tanggung jawab bersama dalam penguatan pendidikan karakter siswa.

2. Guru

bagi guru dapat meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik yang dapat menguatkan karakter siswa

### 3. Peneliti

bagi peneliti dapat mengimplementasikan teori-teori yang telah didapatkan , sehingga peneliti dapat membandingkan antara teori dan penerapannya dilapangan.